

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Belanja Modal

Menurut Mangkoesoebroto pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.¹

Pendekatan pengeluaran berarti pembagian dana dari pusat kepada pemerintah daerah untuk menutup seluruh atau bagian biaya berupa pinjaman, bantuan (sumbangan) atau bagian hasil pungutan; pemberian ini mungkin menutup seluruh pengeluaran tertentu atau membiayai pelayanan atau program pembangunan tertentu.²

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal memiliki kategori diantaranya:³

- a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah

¹ Azwar, *Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan. Vol.20. No.2. Agustus 2016. Hlm. 152.

² Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah* (Jakarta: UI Press, 1998). Hlm. 268.

³ Mursyidi, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013). Hal. 305.

- b) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah
- c) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja modal adalah pengeluaran Negara yang digunakan dalam rangka pembentukan modal atau aset untuk operasional sehari-hari dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan bentuk fisik lainnya.⁴

Belanja modal merupakan belanja yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, serta menimbulkan konsekuensi bertambahnya biaya yang bersifat rutin untuk pembiayaan pemeliharaan. Aset tetap tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari dan bukan untuk dijual.⁵

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan

⁴ Muhammad Iqbal, *Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Riau Dan Sumatera Barat)*, vol.4. No.1, 1 Februari 2017. Hal. 886.

⁵ Fitriyati, *Analisis Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Pada Anggaran Pemerintah Daerah* (Makasar: Universitas Hasanudin, 2012).

dengan aset lain dan membeli. Proses pembelian aset tetap di dalam pemerintahan biasanya dilakukan dengan cara lelang atau tender.⁶

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan gedung, tanah, dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal memiliki 5 (lima) Kategori, yaitu:

a) Belanja modal tanah

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

b) Belanja modal peralatan dan mesin.

Belanja modal peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor,

⁶ Syukriy Abdullah & Abdul Halim, *Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Pemeliharaan Dan Sumber Pendapatan*. Vol. 2. No.2. November 2006. Hal. 19.

dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan peralatan dan mesin adalah seluruh pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya tersebut mencakup biaya pembelian, pengangkutan, instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c) Belanja modal gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan tersebut sampai siap pakai. Biaya tersebut meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

d) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Biaya yang digunakan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan. Biaya tersebut meliputi biaya perolehan atau

biaya konstruksi dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan siap digunakan.

e) Belanja modal asset tetap lainnya

Asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

2. Pengeluaran Dalam Islam

Berdasarkan analisis ekonomi terhadap sejarah pengeluaran publik islam semasa Rasulullah SAW dan *Khulafaurrasyidin* serta kaidah *fiqh* muamalah, pada hakikatnya prinsip utama dalam pengalokasian dana publik adalah peningkatan *maslahat* tertinggi.⁷

Secara umum, belanja Negara dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:⁸

- a. Pemberdayaan fakir miskin dan *muallaf*. Dana ini pada umumnya berasal dari zakat dan 'ushr.
- b. Biaya rutin pemerintahan. Dana ini pada umumnya diambil dari *kharaj, fai'i, jizyah, 'ushr*.
- c. Biaya pembangunan dan kesejahteraan sosial. Dana ini pada umumnya diambil dari dana lainnya *khums* dan sedekah.

⁷ Ririn Tri Puspita Ningrum, Refleksi Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam Sebagai Kerangka Perumusan Kebijakan Fiskal Negara, STAINU Madiun, 2015. Hal.96.

⁸ *Ibid.* hal. 97.

d. Biaya lainnya, seperti biaya *emergency*, pengurusan anak terlantar dan sebagainya. Dana ini pada umumnya diambil dari waqaf, utang publik dan sebagainya.

Dengan empat jenis keuangan publik di atas, besaran dan skala prioritas alokasi tidaklah selalu sama di setiap Negara ataupun waktu. Secara garis besar prinsip yang harus diterapkan dalam pengeluaran publik, adalah:⁹

- a. Alokasi zakat adalah kewenangan Allah, bukan kewenangan amil atau pemerintah. Amil hanya bertugas menjalankan manajemen zakat sehingga dapat dicapai pendistribusian yang sesuai dengan ajaran Islam.
- b. Penerimaan selain zakat dialokasikan mengikuti beberapa prinsip, yaitu:
 - (1) Kebijakan dan belanja Negara harus diarahkan untuk mewujudkan semaksimal mungkin *maslahah*.
 - (2) Menghindari *masyaqqoh* (kesulitan) dan *mudharat* harus didahulukan daripada melakukan perbaikan.
 - (3) *Mudharat* individu dapat dijadikan alasan demi menghindari *mudharat* dalam skala yang lebih luas
 - (4) Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.

⁹ *Ibid.* hal. 98.

(5) Manfaat publik yang didistribusikan adalah keseimbangan dengan penderitaan atau kerugian yang ditanggung

(6) Jika suatu belanja merupakan syarat untuk ditegakkannya syariat islam, maka belanja tersebut diwujudkan (*kaidah ma la yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajibun*).

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwasannya efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam prinsip pengeluaran pemerintah yang dalam ajaran islam dipandu dalam kaidah-kaidah *syar'iyah* dan skala prioritas sehingga tujuan pembelanjaan Negara dapat tercapai. Di antara tujuan pembelajaran Negara dalam islam antara lain.

- a. Pengeluaran demi memenuhi kepentingan masyarakat
- b. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan
- c. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif
- d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
- e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar. Selain itu Negara memiliki wewenang dalam roda perekonomian dalam hal tertentu yang tidak dapat diserahkan pada sektor-sektor privat untuk menjalankannya seperti membangun fasilitas umum dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Kebijakan belanja pemerintah dalam sistem ekonomi islam dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin
2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia
3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Negara merupakan sumber utama belanja Negara disamping komponen pembiayaan anggaran pendapatan Negara yang meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak.¹⁰

Pendekatan pendapatan dalam hubungan keuangan, berdasarkan kepada pemberian sumber-sumber berpendapatan tertentu kepada pemerintah daerah. Hal ini berupa lapangan perpajakan yang dapat digali secara bebas atau berupa bagian dari pendapatan nasional. Dengan demikian besar kecilnya pengeluaran daerah tergantung kepada jumlah pendapatan yang benar-benar bersumber dari pendapatan tersebut.¹¹ Penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan Negara.¹²

¹⁰ Sarastika Indrawati Dan Daryono Soebagiyo, *Analisis Uji Kausalitas Penerimaan Pajak Dan Pengeluaran Pemerintah Di Kota Surakarta Dengan Menggunakan Metode Granger Tahun 1978-2003*. Jurnal ekonomi pembangunan. Vol. 7. No.2. Desember 2006

¹¹ Davey. Hlm. 258.

¹² Joko Sumantri. *Pengaruh Penerimaan dan Pengeluaran Negara Terhadap Imbal Hasil Mismatch Treasury Bills*. Jurnal pajak Indonesia. Vol.1. no.1. 2017.hlm. 3.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dan pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).¹³

Sumber-sumber keuangan daerah yakni pendapatan daerah terdiri atas:*Pertama*, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. *Kedua*, dana perimbangan. *Ketiga*, lain-lain pendapatan daerah yang sah.¹⁴

a. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-

¹³ A.W. Widjaja. Titik berat otonomi pada daerah tingkat II (Jakarta: rajawali pers, 1992) hal. 42.cetakan pertama.

¹⁴ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015). Hal. 59.

Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1) Pajak provinsi, antara lain:

- (a) Pajak kendaraan bermotor
- (b) Bea balik nama kendaraan bermotor
- (c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- (d) Pajak air permukaan
- (e) Pajak rokok

2) Pajak kabupaten, antara lain:

- (a) Pajak hotel
- (b) Pajak restoran
- (c) Pajak hiburan
- (d) Pajak reklame
- (e) Pajak penerangan jalan
- (f) Pajak mineral bukan logam dan bantuan
- (g) Pajak parker
- (h) Air tanah
- (i) Pajak sarang burung wallet
- (j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- (k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian perizinan

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan pungutan langsung yang dikenakan untuk pelayanan tertentu dari pemerintah daerah. Pungutan ini dibedakan dari pajak daerah, yang dipungut tanpa menunjuk langsung pelayanan yang diberikan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 objek retribusi daerah adalah:

1) Jasa umum

- (a) Retribusi Pelayanan kesehatan
- (b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- (c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- (d) Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
- (e) Retribusi pelayanan parker ditepi jalan umum
- (f) Retribusi pelayanan pasar
- (g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- (h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- (i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- (j) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- (k) Retribusi pengolahan limbah cair
- (l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- (m) Retribusi pelayanan pendidikan
- (n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

2) Jasa usaha

- (a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- (b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- (c) Retribusi tempat pelelangan
- (d) Retribusi terminal
- (e) Retribusi tempat khusus parkir
- (f) Retribusi tempat Penginapan/ pesangrahan/villa
- (g) Retribusi rumah potong hewan
- (h) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
- (i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- (j) Retribusi penyeberangan di air
- (k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3) Perizinan tertentu

- (a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- (b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- (c) Retribusi izin gangguan
- (d) Retribusi izin trayek
- (e) Retribusi izin usaha perikanan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup penerimaan laba atas penyertaan modal Badan usaha Milik Daerah (BUMD), laba

penyertaan modal Badan usaha Milik Negara (BUMN), dan laba penyertaan modal perusahaan swasta.

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang perolehannya diserahkan kepada Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini merupakan sub bidang keuangan daerah yang khusus ada pada daerah yang pemerintahannya juga menjalankan fungsi-fungsi penyediaan barang-barang non publik. Pemerintah melakukan investasi pada BUMN atau BUMD atau lembaga keuangan Negara atau daerah lainnya sehingga timbul hak dan kewajiban Negara berkenaan dengan investasi tersebut.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari:

1. Bagian laba dari perusahaan daerah
 2. Bagian laba dari lembaga keuangan bank (Bank Daerah)
 3. Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah

Lain-lain PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, penerimaan ini berasal dari penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Selain

jenis-jenis PAD diatas, pendapatan daerah dapat pula berasal dari lain-lain PAD yang sah seperti:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
2. Lain giro atas penyimpanan uang APBD pada sebuah bank pemerintah
3. Pendapatan giro
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan aturan pengadaan barang dan atau aturan jasa oleh daerah.

4. Pendapatan Negara dalam islam

Dalam pemerintahan islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah. Saw. Salah satu konsep baru di bidang keuangan Negara pada masa itu adalah mengumpulkan semua hasil pendapatan Negara dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dibelanjakan. Tempat pengumpulan itu disebut dengan *Baitul mal* (Rumah harta). Pada masa pemerintahan Rasulullah Saw. *Baitul Mal* terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat Negara. Kemudian di teruskan dengan pemerintahan *khulafaurrasyidin*. Pada masa pemerintahan Abu Bakar *as-Siddiq*, *Baitul Mal* menjadi lembaga yang

regular dan permanen dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapi.¹⁵

Sumber-sumber pendapatan Negara dalam islam adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Khums

Hasil rampasan perang (ghanimah) atau disebut dengan Khums (seperlima) merupakan pendapatan yang berasal dari hasil rampasan perang seperti kuda, unta, dan barang bergerak lainnya. Seperti terdapat dalam Q.S Al-Anfal ayat 41.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَإِذَا السَّبِيلِ إِنَّ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

“Dan ketauhilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak yatim, oaring miskin, dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqon, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

b. Kharaj

Secara bahasa *Kharaj* bererti kontrak, sewa-menyewa atau menyerahkan. Sedangkan dalam termonologi keuangan islam,

¹⁵ Adiwarmarman Azhar Karim. *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).hal.59

¹⁶ Ibid. hal.47.

kharaj pajak atas tanah atau hasil tanah milik orang islam, dimana para pengelola tanah tersebut harus membayar sewa.¹⁷

c. ‘ushr

‘*ushr* merupakan pajak jual beli (*maqs*). Tingkat ukuran yang paling umum digunakan adalah 2,5% untuk pedagang muslim, 5% untuk kafir *dzimmi*, dan 10% untuk kafir *harbi* dengan asumsi harga barang melebihi 200 dirham.

d. Zakat

Zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya yang telah ditetapkan oleh syariat islam.¹⁸ Zakat terdapat dalam Q.S. Ar-Rum ayat 37-40.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 33 قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ
وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 38 وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا
لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ {39}
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ ۗ هَلْ مَن يَعْلَمُنَّ ذُلُّكُمْ مِن شَيْءٍ ۗ سُبْحَانَ
وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ {40}

Artinya:

“ Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan dia pula yang menyempitkan (rizki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itu lah yang lebih baik bagi

¹⁷ Adiwarman Azhar Karim. *Op. cit.* hal. 105.

¹⁸ Mustofa Edwin Nasution, Budi setyanto dan Nurul huda, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (kencana, jakarta,2007), hlm.205.

orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itu lah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Maka 9yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah diantara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Suci lah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.”

e. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Ia adalah membenaran (pembuktian) keimanan kepada Allah dan Rasulnya yang diwujudkan dengan pengorbanan materi. Sedekah telah dituliskan di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. ”

f. Waqaf

Wakaf yaitu harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama Allah.¹⁹ Dalam hukum islam, waqaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga waqaf) baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan (*wakif*), dan bukan pula hak milik *nadzir*/lembaga pengelola wakaf tetapi menjadi hak milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.²⁰ Waqaf terdapat dalam Q.S Ali-Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infkakkan,tentang hal itu, sesungguhnya Allah maha mengetahuinya.”

g. *Jizyah*

Secara bahasa *jizyah* berasal dari kata *jaza'* yang berarti kompensasi. *Jizyah* merupakan pajak yang dipungut dari non-muslim yang hidup dibawah pemerintahan islam tetapi tidak mau masuk islam. Pajak yang dikenakan mereka merupakan pengganti

¹⁹ Adiwarmarman Azhar Karim. *Op. cit.* hal. 48.

²⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Op. Cit.*,hlm.2015.

dari imbalan atas fasilitas ekonomi, social dan layanan kesejahteraan yang mereka terima dari pemerintahan islam, juga sebagai jaminan dan keamanan hidup dan harta mereka.²¹ Seperti telah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

5. Kinerja Keuangan

kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.²²

Sedangkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau

²¹ Adiwarman Azhar Karim. *Op. cit.* hal. 128.

²² Gredi Normala sari, dkk. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2011*, (Manado: Univeristas Sam Ratulangi, 2015).

program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan rutinitas dan kualitas terukur.

Menurut peraturan pemerintah no 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.²³

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan *value for money* yaitu dengan menguji tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi merupakan perolehan masukan(*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara masukan yang terjadi dengan nilai masukan seharusnya. Sedangkan, Efisiensi merupakan pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu atau menggunakan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektivitas

²³ Firmansyah Thalib. *Pengaruh Pad, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Di Jawa Timur Periode 2013-2017*, artikel ilmiah, (Surabaya: STIE Perbanas, 2019).

merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.²⁴

Dalam organisasi pemerintahan untuk mengukur kinerja keuangan terdapat beberapa ukuran kinerja yang dapat diperhitungkan diantaranya rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.²⁵ Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin turun kinerja. Sedangkan semakin rendah efisiensi maka menunjukkan kinerja yang baik.²⁶

6. Kinerja Dalam Islam

Terdapat tiga unsur penting untuk menciptakan kehidupan yang positif dan produktif. Pertama, mendayagunakan potensi yang telah diberikan oleh Allah Swt. Untuk bekerja, melaksanakan gagasan, dan memproduksi. Kedua, bertawakkal kepada Allah, berlindung dan meminta pertolongan hanya kepada-Nya. Ketiga, percaya bahwa Allah Swt. Akan memberikan perlindungan. Al-Qur'an surat Yasin ayat 33-35 menyatakan bahwa:

وَأَيُّ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ 33 جَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ

²⁴ Lathifah Ridla Agustina. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia*. skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).hal.24.

²⁵ Ibid. hal.25.

²⁶ Srimulyani dan Hardiyanto Wibowo. *Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015)*, Vol.XV. No. 1. Maret 2017.

وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۚ 34 لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ 35

Artinya

“ (33) Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus). Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari (biji-bijian) itu mereka makan.

(34) Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.

(35) Agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur.”

Rangkaian ayat diatas menjelaskan supaya manusia bersyukur atas apa yang telah Allah Swt. Berikan dengan cara beriman kepada-Nya atas nikmat tersebut Allah Swt. Telah memberikan kesempatan kepada hamba-Nya untuk lebih produktif dan berkinerja dengan baik. Sedangkan makna “*dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka..*” merupakan pilar utama kinerja. Yaitu Allah Swt. Memerintahkan manusia untuk mengelola dan terus meningkatkan apa yang telah disediakan oleh Allah Swt., sehingga mampu berkinerja dengan baik.

7. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno pertumbuhan ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan pertumbuhan perekonomian dari tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase dari pertambahan pendapatan nasional dari tahun sebelumnya.²⁷

²⁷ Dedek Hasanur dan Zainal Putra, *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Kawasan Barat Selatan Aceh)*. Jurnal E.Kombis. vol.III. No.2.2017. hlm.48.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat bertambah.²⁸

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah; a) faktor Sumber Daya Manusia (SDM); b) faktor Sumber Daya Alam (SDA); c) faktor ilmu pengetahuan dan Teknologi.²⁹

a. Indikator dari pertumbuhan ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan suatu unit usaha dalam suatu

²⁸ Ali Ibrahim Hasyim. *Ekonomi Makro Edisi Pertama* (Jakarta: Prenadamedia, 2016). Hlm 14.

²⁹ Windhu Putra, *Perekonomian Indonesia penerapan beberapa teori ekonomi pembangunan di Indonesia* (Depok: Rajawali Pres, 2018). Hlm. 41.

wilayah atau merupakan jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu unit ekonomi di suatu wilayah.³⁰

b. Karakteristik pertumbuhan ekonomi

Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu Negara sebagai peningkatan kemampuan suatu Negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Ketiga komponen itu sangat penting karena:

- (1) Kenaikan output nasional secara terus menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi
- (2) Kemajuan teknologi merupakan persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan
- (3) Perlu melakukan penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideology.³¹

8. Pertumbuhan ekonomi dalam islam

Pertumbuhan ekonomi menurut islam adalah pertumbuhan ekonomi bukan hanya aktivitas produksi saja, lebih dari itu pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi.³²

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus menerus dari faktor produksi secara

³⁰ www.bps.go.id.diakses pada tanggal 11 Februari 2020.

³¹ Subandi, *Ekonomi Pembangunan Edisi Ketiga* (Bandung: Alfabeta, 2014) . hlm. 69.

³² Moch. Zainudin. *Pertumbuhan Ekonomi Perpektif Islam*. Vol.1. No.2. Juli 2017. Hlm 125.

benar yang digunakan untuk kesejahteraan manusia.³³ Seperti Q.S Hud ayat 61 sebagai berikut:

... هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Artinya:

“Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya.”

Bahwa Allah Swt. Menajdikan wakil untuk memakmurkan bumi. *Terminology* ‘pemakmuran bumi’ ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi.³⁴

Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan dalam produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jikaproduksi tersebut misalkan memproduksi barang-barang yang dapat membahayakan manusia. Pertumbuhan mencakup sisi yang lebih luas, bukan hanya persoalan ekonomi saja, akan tetapi mencakup aspek hukum, sosial, politik dan budaya. Dengan kata lain, tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk memajukan dasar-dasar keadilan sosial, kesamaan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan marabat manusia.³⁵

Didalam ekonomi syariah, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

³³ Rizal Muttaqin. *Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif islam*. Vol.1.No.2.November 2018. Hal. 119.

³⁴ Rizal Muttaqin. *Op.cit.* hal.119.

³⁵ *Ibid.* hal. 120

- 1) *Investible resources* (sumberdaya yang dapat diinvestasikan)
- 2) Sumber daya manusia dan *entrepreneurship*
- 3) Terknologi dan inovasi³⁶

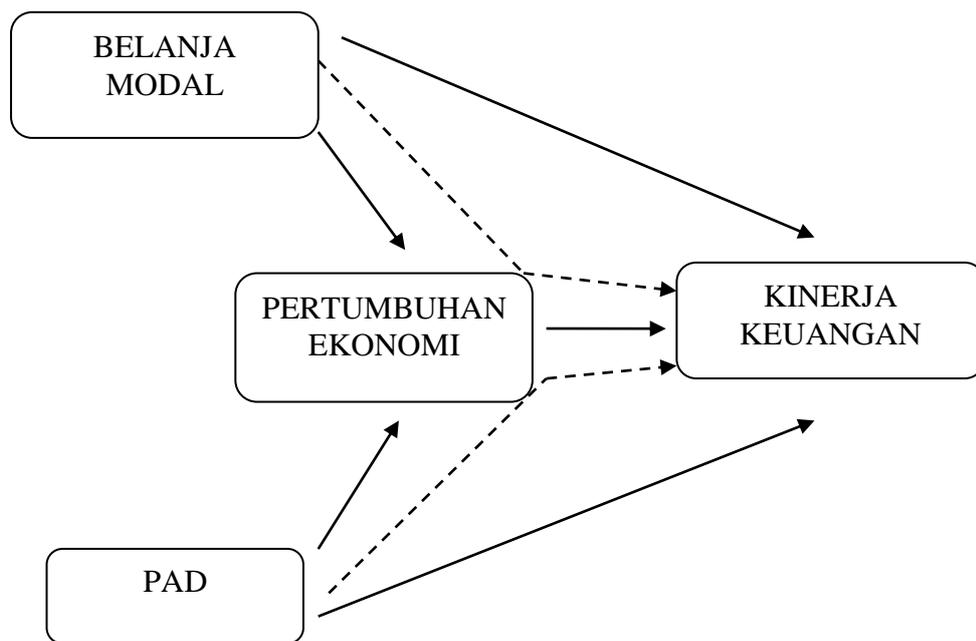
B. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan

³⁶ *Ibid.* hlm. 126.

pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



Sumber: dikembangkan dalam penelitian ini, 2020

Keterangan:

—————> : variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)

- - - - -> variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)
melalui variabel intervening

C. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Chindy Febri Rori.dkk.³⁷ judul penelitian Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Putri Puspita Ayu³⁸ judul penelitian Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa. Hasil dari penelitian ini bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ni Putu Gina Sukma Antasari dan Ida Bagus Panji Sedana³⁹ dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Yuliasti Leki.dkk.⁴⁰ judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah

³⁷ Chindy Febri Rori.dkk. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013*, vol.16. No.2, Tahun 2016.

³⁸ Putri Puspita Ayu. *Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa*, vol. 3. No. 1, Maret 2018.

³⁹ Ni Putu Gina Sukma Antasari dan Ida Bagus Panji Sedana. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. E-jurnal Manajemen Unud. Vol.7.No.2.2018.

⁴⁰ Yuliasti Leki.dkk. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat*. Vol. 18, No. 05 Tahun 2018.

Kabupaten Halmahera Barat. Hasil penelitian ini adalah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan sedangkan belanja modal berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Nanda Dipa Prastiwi dan Andri Waskita Aji⁴¹ dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). Hasil penelitian ini bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan dana keistimewaan dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Crisnadwiheryanti.dkk.⁴² dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan belanja modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap

⁴¹ Nanda Dipa Prastiwi dan Andri Waskita Aji. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018)*. Vol. 28. No.1.2020.

⁴² Crisnadwiheryanti.dkk. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan belanja modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur*. vol. 3. No. 1, Maret 2019.

kinerja keuangan sedangkan pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Siros⁴³ dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat . Hasil dari penelitian ini adalah Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Ukuran Legislatif berpengaruh signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

Fatimah Nur Ubaidah⁴⁴ judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan sedangkan dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Lathifah Ridla Agustina⁴⁵ judul penelitiannya adalah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia. Hasil dari penelitian ini bahwa PAD, DAK

⁴³ Siros. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat*. (Padang: STKIP PGRI, 2017).

⁴⁴Fatimah Nur Ubaidah *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015*. skripsi, (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018).

⁴⁵Lathifah Ridla Agustina. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia*. skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan DAU dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Zuwesty Eka Putri⁴⁶ dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (Pad) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Inflasi tidak berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian (Tahun)	Judul	Hasil
1.	Chindy Febri Rori,	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa

⁴⁶Zuwesty Eka Putri. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Vol.5. No.2. Oktober 2015.

	dkk (2016)	Daerah (PAD), Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013	pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2.	Putri Puspita Ayu (2018)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa Barat	Hasil dari penelitian ini bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah..
3.	Ni Putu Gina Sukma Antasari dan Ida Bagus Panji Sedana (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4.	Yuliasti Leki.dkk. (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera	Hasil penelitian ini adalah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan sedangkan belanja modal berpengaruh tetapi tidak sinifikan terhadap kinerja keuangan.

		Barat	
5.	Nanda Dipa Prastiwi dan Andri Waskita Aji (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018)	Hasil penelitian ini bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan dana keistimewaan dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
6.	Crisnadwih eryanti.dkk. (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan belanja modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan..
7.	Siros	Pengaruh Pendapatan	Hasil dari penelitian ini

	(2017)	Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat	adalah Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Ukuran Legislatif berpengaruh signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
8.	Fatimah Nur Ubaidah (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan sedangkan dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.
9.	Lathifah Ridla Agustina (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia	Hasil dari penelitian ini bahwa PAD, DAK dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan DAU dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

10	Zuwesty Eka Putri (2015)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (Pad) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Inflasi tidak berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
----	--------------------------------	---	---

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.⁴⁷ Berdasarkan teori diatas dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan maka dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesis yaitu:

1. Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Menurut mangkoesoebroto yang telah dijelaskan diatas bahwa jika pemerintah telah membuat kebijakan untuk pengadaan barang ataupun jasa maka pengeluaran pemerintah menjadi cerminan dari biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut. Belanja modal merupakan salah satu pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pengadaan asset tetap. Dalam

⁴⁷ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010). Hlm 84.

penelitian yang dilakukan oleh Crisnadwiheryanti.dkk.⁴⁸ hasil penelitian ini menyebukan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keungan pemerintah daerah. Semakin tinggi belanja modal suatu daerah untuk pengadaan asset tetap dll, maka kinerja keuangan yang baik harus dilakukan.

H₀: belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

H₁: belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Menurut Sarastika Indrawati dan Daryono Soebagiyo, pendapatan Negara merupakan sumber utama dari pengeluaran Negara. Pendapatan Negara berasal dari penerimaan pajak dan non-pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Besar kecilnya penerimaan PAD dapat menggambarkan keberhasilan daerah itu dalam mengelola potensi yang berasal dari daerah masing-masing. Sehingga pemerintah daerah akan meningkatkan potensi tersebut dan cenderung akan mempengaruhi kinerja keuangan. Penelitian Putri

⁴⁸ Crisnadwiheryanti.dkk. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan belanja modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur*. vol. 3. No. 1, Maret 2019.

Puspita Ayu⁴⁹ hasil dari penelitian ini adalah bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₀: Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

H₂: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

3. Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi

Belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan perbaikan dan pembangunan untuk daerah. Sehingga dengan adanya pembangunan dan perbaikan di sektor infrastruktur yang baik maka produktivitas masyarakat juga akan semakin tinggi dan berakibat adanya pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana⁵⁰ hasilnya mengatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi anggaran yang diperlukan untuk perbaikan di berbagai sektor tersebut maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

H₀: belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

H₃: belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi

⁴⁹ Putri Puspita Ayu. *Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa*, vol. 3. No. 1, Maret 2018.

⁵⁰ Yuliana, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera)*, jurnal akuntansi & keuangan, vol. 5. No.1, Maret 2014.

Suatu daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif tentu akan meningkatkan PAD pada daerah tersebut. Suatu daerah yang mengalami peningkatan PAD akan menjadikan kemandirian pada daerah tersebut. Dengan adanya peningkatan PAD tersebut pemerintah daerah akan menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya. Sehingga jika PAD mengalami kenaikan, pertumbuhan daerah juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Chindy Febry Rori, dkk⁵¹ hasilnya bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₀: Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

H₄: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

5. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Suatu daerah yang dikatakan mengalami pertumbuhan dari segi ekonomi apabila tingkat kegiatan perekonomian daerah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.⁵² Banyaknya kegiatan yang terjadi di daerah tersebut juga mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Dalam hal ini pemerintah perlu

⁵¹ Chindy Febri Rori, dkk, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013*, jurnal berkala ilmiah efisiensi Vol. 16. No. 02 tahun 2016.

⁵² Lily Kusumawati dan I Gusti Wiksuana, *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali*, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7. No. 5. 2018. Hlm.2593.

melakukan pengawasan terhadap kinerja keuangan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Nina Andriany Nasution⁵³ yang hasilnya bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₀: pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

H₅: pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

6. Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening

Suatu daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi akan melakukan pembangunan di daerahnya. Salah satu yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan anggaran untuk belanja modal. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dengan demikian jika suatu daerah tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi maka belanja modal akan mengalami peningkatan dan dengan ini kinerja keuangan yang baik dalam pemerintah daerah sangat diperlukan. Penelitian yang dilakukan oleh Siros⁵⁴ yang mengatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

⁵³ Nina Andriany Nasution dan Fitri Yani Pangabea, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara* Vol.8. No.1, Juli 2017.

⁵⁴ Siros. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat*. (Padang: STKIP PGRI, 2017).

daerah serta penelitian yang dilakukan oleh Nina Andriany Nasution⁵⁵ yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₀: belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening

H₆: belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening

7. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening

Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yang tinggi akan mengidentifikasi bahwa terjadi peningkatan perekonomian suatu daerah tersebut. Jika suatu daerah tersebut mengalami peningkatan, pendapatan daerah tersebut juga mengalami peningkatan. Meningkatnya aktivitas perekonomian suatu daerah akan membutuhkan pengawasan yang baik sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang terdahulu oleh Yuliasti Leki.dkk.⁵⁶ yang hasil penelitiannya mengatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian

⁵⁵ Nina Andriany Nasution dan Fitri Yani Pangabea, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara* Vol.8. No.1, Juli 2017.

⁵⁶Yuliasti Leki.dkk. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat*. Vol. 18, No. 05 Tahun 2018.

yang dilakukan oleh Nina Andriany Nasution⁵⁷ mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₀: Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening

H₇: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening

⁵⁷ Nina Andriany Nasution dan Fitri Yani Pangabean, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara* Vol.8. No.1, Juli 2017.